

PENANGGULANGAN BENCANA KEKERINGAN DI KABUPATEN SUMBA BARAT PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

¹Loeta Eben Haezer Galla; ²Ida Yunari Ristiani

¹NPP. 31.0789

¹Asdaf Kabupaten Sumba Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur
Program Studi Manajemen Keamanan dan Keselamatan Publik

Email: ¹heizgalla030101@gmail.com ; ²Idayunarir@ipdn.ac.id

ABSTRACT

The Problem (GAP): *The drought was a slow or slow disaster set that resulted in water shortages for domestic needs, agriculture, farms, plantations, and so forth. The impact of the drought on society was split into two, physical and nonphysical. Physical: damage to animal habitat; Erosion; Dead plants; Water quality is declining; Air pollution; Parched ground is planted; And cause induction. Whereas non - physical affects: economics; Social culture; And country politics. The west sumba county is now home to an estimated 92% of the country's population. The study aims to analyze, describe, and identify how the programs in disaster relief work in west sumba county learned, described, and analyzed found constraints and found out, described, and analyzed what was done to address the drought relief in west sumba county.* **Purpose:** *The study aims to analyze, describe, and identify how the programs in disaster relief work in west sumba county learned, described, and analyzed found constraints and found out, described, and analyzed what was done to address the drought relief in west sumba county.* **Method:** *The study employs descriptive qualitative methods. As for data collection methods conducted through interviews and documenting. The data collected are prepared in three phases, namely data reduction, data presentation, and a deduction. The theory used is Nick carter's disaster management theory.* **Result:** *The results from the study show that a severe drought in the west The results of this study show a measure of drought relief in kab. West sumba is done in part; Water distribution assistance in 133 tanks, socializing drought disaster and the manufacture of documents in Canaan by BPBD; Disaster relief by social services; And spam buildings and irrigation areas by pupr services. The obstacles discovered are three; Alert, budgetary, and victimizing policies. Efforts are made to review the status of the drought disaster, to optimize existing budgets, and to enhance the victims' filing process.* **Conclusion:** *The west sumba county's disaster relief efforts are said to be less*

than adequate because it has been increased based on the risk data of the drought in kab. West sumba is nearly 100% affected area.

Key words: *drought, disaster management, and disaster relief*

ABSTRAK

Permasalahan (GAP): Bencana kekeringan adalah bencana yang berlangsung perlahan-lahan atau bencana bersifat Slow On Set yang mengakibatkan kekurangan air untuk kebutuhan domestik, pertanian, peternakan, perkebunan, dan sebagainya. Dampak bencana kekeringan kepada masyarakat terbagi menjadi dua, fisik dan nonfisik. Secara fisik: Kerusakan habitat binatang; Erosi; Tanaman mati; Kualitas air Menurun; Polusi udaral; Tanah gersang ditanami; dan Mengakibatkan pelapukan. Sedangkan non fisik mempengaruhi: Ekonomi; Sosial Budaya; dan Politik Negara. Kabupaten Sumba Barat terdapat korban terdampak kekeringan sebanyak dimana hampir 92% penduduk Sumba Barat terdampak kekeringan. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis, mendeskripsikan, dan mengidentifikasi bagaimana program dalam penanggulangan bencana di kabupaten Sumba Barat, lalu mengetahui, mendeskripsikan, dan menganalisis menemukan kendala dan mengetahui, mendeskripsikan, dan menganalisis apa upaya yang dilakukan dalam penanggulangan bencana kekeringan di kabupaten Sumba Barat. **Metode:** Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Adapun metode pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan dokumentasi. Data yang telah terkumpul diolah dalam tiga tahap, yakni reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Teori yang digunakan adalah teori Manajemen Bencana milik Nick Carter. **Hasil/Temuan:** Hasil dari penelitian ini menunjukkan penanggulangan bencana kekeringan di Kab. Sumba Barat dilakukan dengan antara lain; bantuan distribusi air sebanyak 133 tangki, sosialisasi bencana kekeringan dan pembuatan dokumen kebencanaan oleh BPBD; bantuan bencana oleh Dinas Sosial; dan pembangunan SPAM dan Daerah Irigasi oleh Dinas PUPR. Kendala yang ditemukan ada tiga yaitu; Kebijakan yang berstatus siaga, Anggaran, dan Pendataan korban. Upaya yang dilakukan mengkaji kembali status bencana kekeringan, melakukan pengoptimalan anggaran yang ada, dan meningkatkan proses pendataan korban. **Kesimpulan:** Penanggulangan bencana kekeringan di Kabupaten Sumba Barat dapat dikatakan masih kurang baik hal ini diperkuat berdasarkan data risiko terdampak kekeringan di Kab. Sumba Barat hampir mencapai 100% daerah terdampak.

Kata Kunci: *Kekeringan, Manajemen Bencana, dan Penanggulangan Bencana*

I. PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Kekeringan adalah salah satu bencana alam yang terjadi secara alamiah maupun karena ulah manusia. Seperti bencana pada umumnya, bencana kekeringan tentunya terjadi karena ada penyebab dan juga memiliki dampak yang ditimbulkan bagi manusia dan lingkungan.

Nusa Tenggara Timur yang merupakan bagian dari wilayah terdampak cukup kuat bencana kekeringan sangat merasakan betul kekeringan melanda sebagian besar wilayahnya, enam kecamatan di empat kabupaten di Nusa Tenggara Timur mengalami kekeringan ekstrem. Sementara sejumlah kecamatan di 16 kabupaten lain dalam kondisi siaga kekeringan. Berdasarkan data kekeringan di wilayah Nusa Tenggara Timur memiliki angka yang tinggi dan terus mengalami peningkatan. Sumba Barat adalah salah satu kabupaten yang memiliki risiko bencana kekeringan tertinggi berdasarkan data (BPS NTT, 2022). Sumba Barat adalah salah satu daerah yang berada pada provinsi NTT, jumlah penduduk Sumba Barat ada 145.097 jiwa (BPS Sumba Barat, 2020). Sumba Barat memiliki iklim seperti daerah NTT lainnya. Maka Sumba Barat cenderung mengalami musim kemarau yang lebih lama dan berpotensi mengalami kekeringan yang tinggi. Hal ini dikarenakan Sumba Barat termasuk kedalam iklim Sabana Tropis (Isna Aziz, 2018). Pada data menunjukkan bahwa korban terdampak kekeringan di Sumba barat ada 145.097 jiwa pada tahun 2023 dan saat itu hampir 100% masyarakatnya terdampak kekeringan. Berdasarkan data bahwa kasus bencana kekeringan di Sumba Barat sangatlah tinggi dikarenakan di tahun 2020 ada 74 desa/kelurahan terdampak kekeringan, namun mengalami penurunan yang tidak signifikan pada tahun 2021 menjadi 39 desa/kelurahan.

Menindaklanjuti data tersebut pemerintah kabupaten Sumba Barat mengeluarkan Peraturan Bupati nomor KEP/HK/622/2023 Tentang Status Keadaan Siaga Darurat Penanganan Bencana Kekeringan Dan Bencana Kebakaran Hutan Dan Lahan Di Kabupaten Sumba Barat yang digunakan sebagai landasan penanggulangan bencana kekeringan di Kabupaten Sumba Barat. Sehingga dalam standar operasional tanggap darurat penanggulangan bencana kekeringan melibatkan pemangku kepentingan dalam penanganan bencana antara BMKG, TNI/Polri, BASARNAS, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Dinas PUPR, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Forum PRB dan lainnya. Namun pada penelitian ini penulis berfokus pada 3 opd yaitu BPBD, Dinas PUPR, dan Dinas Sosial

1.2.Kesenjangan Masalah yang Diambil

Berdasarkan penjelasan badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) ahir-ahir ini cuaca panas tengah melanda sebagian wilayah Indonesia, hal itu disebabkan karena dipicu fenomena pemanasan Suhu Muka Laut (SML) diatas kondisi normalnya yang terjadi di Samudera Pasifik bagian tengah hingga timur yang disebut dengan el nino. Pemanasan SML ini meningkatkan potensi pertumbuhan awan di Samudera Pasifik tengah dan mengurangi curah hujan di

wilayah sekitarnya, termasuk seperti di Indonesia. Menurut BMKG, El Nino memiliki dampak yang beragam dalam lingkup skala global. Beberapa negara di kawasan Amerika Latin seperti Peru, saat terjadi El Nino akan berdampak pada meningkatnya curah hujan di wilayah tersebut. Sedangkan di Indonesia secara umum dampak dari El Nino adalah kondisi kering dan berkurangnya curah hujan. Prakiraan curah hujan bulanan BMKG menunjukkan bahwa sebagai besar wilayah Indonesia akan mengalami curah hujan bulanan kategori rendah bahkan sebagian lainnya akan mengalami kondisi tanpa hujan sama sekali hingga Oktober.

BMKG mencatat secara keseluruhan, tahun 2016 merupakan tahun terpanas di Indonesia dengan nilai anomali 0.8 °C relatif terhadap periode klimatologi 1981 hingga 2020 (BMKG, 2023). Tahun 2020 menempati urutan kedua tahun terpanas dengan nilai anomali 0.7 °C, dengan tahun 2019 di peringkat ketiga dengan nilai anomali 0.6 °C. dan World Meteorological Organization (WMO) mencatat bahwa tahun 2023 menjadi tahun dengan penuh rekor temperatur diantaranya yaitu sepanjang Juni-Agustus menjadi 3 bulan terpanas sepanjang sejarah serta gelombang panas (heatwave) terjadi di banyak tempat secara bersamaan dan semua itu akan berdampak pada terjadinya kekeringan di beberapa daerah di Indonesia

Beberapa daerah yang akan terdampak cukup kuat adalah sebagian besar wilayah Sumatera seperti Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Riau, Bengkulu, Lampung. Seluruh Pulau Jawa, Bali, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Utara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Tenggara diprediksi memiliki curah hujan paling rendah dan berpotensi mengalami musim kering yang ekstrem (Rozar Putratama, 2023).

Dapat dilihat bawah kekeringan di wilayah Nusa Tenggara Timur memiliki angka tinggi dan terus mengalami peningkatan. Sumba Barat adalah salah satu kabupaten yang memiliki risiko bencana kekeringan tertinggi berdasarkan data (BPS NTT, 2022). Data menunjukkan bahwa korban terdampak kekeringan di Sumba barat ada 139.746 jiwa pada tahun 2019 dan saat itu hampir 100% masyarakatnya terdampak kekeringan.

Sumba Barat adalah salah satu daerah yang berada pada provinsi NTT, jumlah penduduk Sumba Barat ada 145.097 jiwa (BPS Sumba Barat, 2020). Sumba Barat memiliki iklim seperti daerah NTT lainnya. Maka Sumba Barat cenderung mengalami musim kemarau yang lebih lama dan berpotensi mengalami kekeringan yang tinggi. Hal ini dikarenakan Sumba Barat termasuk kedalam iklim Sabana Tropis (Isna, 2018).

1.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini mengambil referensi dari beberapa karya ilmiah yang diantaranya “MANAJEMEN PENANGGULANGAN BENCANA BANJIR, PUTING BELIUNG, DAN TANAH LONGSOR DI KABUPATEN JOMBANG” oleh (Nisa Farichatun, 2014) dengan hasil penelitian berupa manajemen penanggulangan bencana yang dilakukan oleh BPBD dilakukan melalui tahapan respons, pemulihan, dan pengembangan. Tahapan paling dominan yang dilakukan

oleh BPBD Kabupaten Jombang melalui tindakan respons sebelum dan sesudah terjadinya bencana. Lalu ada penelitian milik Rangga Riawan Haryo Praseno dan (Gerry Katon Mahendra, 2021) dengan judul “PERAN PEMERINTAH DESA HARGOMULYO KECAMATAN KOKAP KABUPATEN KULON PROGO DALAM PENANGGULANGAN KEKERINGAN” dengan hasil menunjukkan bahwa dengan adanya keberhasilan dalam penanggulangan bencana kekeringan ditunjukkan dengan tersedianya air bersih dari truk tangki pada bencana kekeringan di setiap tahunnya.

“MITIGASI BENCANA DALAM PENINGKATAN KEWASPADAAN TERHADAP ANCAMAN GEMPA” (Nursyabani, 2020) dengan hasil mitigasi bencana dalam peningkatan kewaspadaan terhadap ancaman gempa bumi di Universitas Andalas belum berjalan optimal. “PENILAIAN BENCANA KEKERINGAN DAN STRATEGI PENYEDIAAN AIR BERSIH DI WILAYAH UTARA KABUPATEN LUMAJANG” (Setyawan Purnomo. Dkk, 2021) dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa indeks kekeringan (SPI-12) memiliki kesesuaian dengan kondisi kekeringan yang terjadi di lapangan. “PERAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DALAM MENGATASI KEKERINGAN DI KABUPATEN WONOGIRI” oleh (Krismon Dewi Arinci dan Asianto Nugroho, 2020) dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa urgensi pelaksanaan penanggulangan bencana kekeringan di kabupaten Wonogiri Pasal 37 (2) Nomor 7 Tahun 2016 melalui kajian yuridis telah sesuai dengan peraturaran perundang-undangan yang berlaku. “KONDISI DAN KONSEP PENANGGULANGAN BENCANA KEKERINGAN DI JAWA TENGAH” (Henny Pratiwi Adi, 2011) dengan hasil penelitian ini adalah analisis kondisi kekeringan di beberapa distrik Semarang, Blora, Grobogan, Demak, Pati dan Sukoharjo. Konsep yang diusulkan mitigasi kekeringan dibagi dalam penanganan jangka pendek, menengah dan panjang, dan analisis upaya implementasi dibuat terutama untuk pengobatan jangka menengah dengan teknologi kolam produksi, sah (model tertutup air hujan), PAH (model air hujan yang terbuka), sumur penyerapan, sumur cekok, sumur cekok, sumur cekok, sumur cekok, sumur cekok, sumur cekok, sumur cekok, sumur cekok, sumur cekok, sumur cekok, sumur cekok, sumur cekok, dan model pemurnian air sederhana. “PENDIDIKAN DAN PENDAMPINGAN MASYARAKAT TANGGUH BENCANA KEKERINGAN DI KECAMATAN KUALIN DAN AMANUBAN SELATAN KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR” (Ignasius Suban Angina, Angin dan Nurmasa Atapukang, 2016) dengan hasil Pemberdayaan masyarakat dalam mitigasi bencana kekeringan dapat dilakukan melalui pendidikan dan pendampingan lewat kearifan lokal masyarakat setempat.

“PERANCANGAN TEKNOLOGI ENERGI SURYA UNTUK MENGATASI KEKERINGAN DI DAERAH PERBATASAN” (Isna Royana, 2020) dengan hasil memperlihatkan: berdasarkan pertumbuhan penduduk, total penduduk desa Sulame pada tahun 2029 adalah 6139. Air bersih kebutuhan penduduk sebanyak 22.373,16 L/ hari atau 222,37 m³ / hari dan minum air around 13 m³ / hari. Tapi, kebutuhan air di desa Sulamu belum terpenuhi. Kebutuhan air di Sulamu dapat diberikan dengan air laut membalikkan Osmosis

(SWRO) sistem wjtj teh kapasitas 250 m³ / hari. Dan, air minum dapat disuguhkan dengan air keran, membalikkan Osmosis (TWRO) sistem wthh berkapasitas 12000 GPD. Rata-rata rata-rata radiasi matahari tahunan di Kupang adalah 5,07 kWh/m² / hari, dengan radiasi matahari minimum adalah 4,35 kWh/m² / hari dan radiasi surya maksimum adalah 5,87 kWh/m² / hari. Potensi tersebut dapat digunakan sebagai pembangkit listrik tenaga surya dengan sistem tenaga surya untuk mendukung proses penanganan air (SWRO dan TWRO) dengan kapasitas 14 KWp.

“ANALISIS KEKERINGAN DI KABUPATEN ENDE PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR” (Made Mira Charisma, dkk, 2015) dengan hasil menunjukkan bahwa kondisi historis kekeringan yang terparah terjadi pada tahun 1994. Kondisi ekstrem ini diduga berhubungan dengan fenomena ENSO yang terjadi di daerah ini. Apabila dibandingkan dengan kondisi historis, kondisi kekeringan masa depan lebih rendah. Kondisi ini sesuai dengan hasil prediksi curah hujan masa depan, yang menunjukkan bahwa curah hujan untuk kedua skenario A2 dan B2 meningkat pada periode 2050-an. Mitigasi bencana kekeringan yang dapat dilakukan antara lain memperbaiki infrastruktur irigasi yang ada, membuat tampungan air pada saat musim hujan, dan dengan pemberdayaan masyarakat dalam mengelola lahan pertanian secara maksimal bersama pemerintah daerah setempat. “INFORMASI PERINGATAN DINI POTENSI KEKERINGAN METEOROLOGIS PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR” (Muhammad Indra Bendi, 2024) dengan hasil menunjukkan efektivitas prakiraan potensi dalam memberikan peringatan dini, memungkinkan respons cepat untuk mitigasi dampak kekeringan meteorologis. Integrasi teknologi informasi dengan data meteorologis mendukung upaya adaptasi dan ketahanan terhadap bencana kekeringan. Studi ini memberikan kontribusi pada pemahaman dan pencegahan kekeringan melalui pemanfaatan teknologi informasi.

1.4.Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Dari keseluruhan penelitian yang telah dibahas sebelumnya penelitian yang di Tulis penulis memiliki perbedaan dan persamaan. Perbedaan penelitian ini antaranya metode penelitian yang digunakan penulis adalah metode kualitatif deskriptif dengan menggunakan teori manajemen bencana milik Nick Carter, 2008) dengan 3 dimensi pengkaji yaitu; (1)Mitigation; (2)Response; dan (3)Recovery. Lokus penelitian yang digunakan penulis adalah 3 Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Sumba Barat. Persamaan penelitian dengan 10 penelitian diatas adalah sama-sama membahas penanggulangan bencana dan bencana kekeringan.

1.5.Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis, mendeskripsikan, dan mengidentifikasi bagaimana program dalam penanggulangan bencana di kabupaten Sumba Barat, lalu mengetahui, mendeskripsikan, dan menganalisis menemukan kendala dan mengetahui, mendeskripsikan, dan menganalisis apa upaya yang dilakukan dalam penanggulangan bencana kekeringan di kabupaten Sumba Barat.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif dapat menggambarkan permasalahan dan hubungan dari fenomena untuk menarik kesimpulan untuk pemecahan masalah yang ada dari permasalahannya terkait penanggulangan bencana kekeringan di Sumba Barat.

Dalam buku Metode penelitian sosial (Wekke, 2019:80) teknik pengumpulan data terdiri dari observasi, wawancara, dokumen, dan gabungan dari ketiganya (triangulasi). Pada penelitian ini peneliti menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi.

Setelah dilakukan pengumpulan data, langkah selanjutnya dalam melakukan penelitian adalah melakukan analisis data, karena data tidak memberikan makna bila tidak dilakukan analisis. Teknik analisis data merupakan proses pengumpulan data sistematis yang digunakan untuk mempermudah peneliti dalam menarik kesimpulan. Adapun komponen dalam analisis data menurut Huberman dan Miles dalam Sugiyono(2013:258)

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Penanggulangan Bencana Kekeringan di Kab. Sumba Barat

3.1.1. *Mitigation* (pencegahan)

Pada tahapan peringatan (*Mitigation*) merupakan tahap manajemen bencana yaitu Mitigasi. Tahapan peringatan (*Mitigation*) bencana kekeringan peneliti lebih memfokuskan kepada pembangunan yang dapat dimanfaatkan untuk menghadapi bencana kekeringan dan regulasi tentang pencegahan kekeringan.

Pada Mitigation yang dilakukan oleh pemerintah Kab. Sumba Barat hanya melalui dua OPD yaitu BPBD dan Dinas PUPR dengan melakukan sosialisasi, pembuatan dokumen kebencanaan, dan pembangunan SPAM. Kegiatan-kegiatan ini dinilai efektif untuk membantu pencegahan dan kesiapan untuk menghadapi musim kemarau panjang yang berpotensi menjadi bencana kekeringan.

3.1.2. *Response* (tanggapan)

Pada dimensi Response merupakan pemfokusan pada proses tanggapan yang diberikan oleh OPD terkait kepada bencana kekeringan yang telah terjadi. Peneliti menggunakan Response pada tahap pertama karena kekeringan adalah bencana yang berlangsung perlahan-lahan atau bencana bersifat *Slow On Set* yang mengakibatkan kekurangan air untuk kebutuhan domestik, pertanian, peternakan, perkebunan, dan sebagainya (Rencana Kontigensi Bencana kekeringan NTT, 2023). Maka tindakan yang dapat dilakukan adalah tindakan jika bencana itu

sudah terjadi sehingga dimulai dari tahap tanggapan. Hal lain yang menjadi pertimbangan adalah pada bencana kekeringan tahapan tanggap darurat berlangsung sangat lama.

Response yang dilakukan oleh pemerintah daerah Sumba Barat melalui BPBD dan Dinas Sosial adalah sama-sama memberikan bantuan kepada warga terdampak bencana kekeringan. Kedua OPD memberikan bantuan dalam bentuk bantuan yang berbeda, dimana BPBD memberikan air bersih, sedangkan Dinas Sosial memberikan bantuan pangan dan sandang. Namun tujuan dari pemberian bantuan kedua OPD sama yaitu untuk menjaga kestabilan kehidupan masyarakat pada saat terjadi bencana kekeringan.

Tabel 3.1 data distribusi air bersih Sumba Barat oleh BPBD Sumba Barat tahun 2022

Kecamatann	Tangki	Jiwa
Kota Waikabubak	43	2.004
Loli	29	2.620
Tana Righu	23	1.660
Wanokaka	26	1.456
Lamboya	20	1.976
Lamboya Barat	11	560
Total	133	5.184

Sumber: BPBD Kab. Sumba Barat 2022

Pada Dinas Sosial kendala anggaran yang ditemui yaitu kendala pada biaya transportasi dan biaya belanja bantuan. Dimana dana transportasi yang disediakan kecil dan jumlah kendaraan operasional yang kurang sehingga membuat pihak penyalur menggunakan kendaraan pribadinya dalam penyaluran. Selain itu belanja bantuan bencana yang disamakan sehingga kadang bantuan yang diberi tidak sesuai dengan kebutuhan.

Pada Dinas PUPR juga ditemukan permasalahan anggaran. Dinas PUPR justru masalah anggarannya lebih besar dibanding kedua OPD yang telah dibahas. Banyak program yang berhubungan dengan pembangunan yang membutuhkan anggaran dalam operasionalnya. Anggaran PUPR untuk perawatan dan pembangunan SPAM dibantu oleh dana hibah dari LSM sehingga dapat menutup kebutuhan SPAM yang masih kurang untuk memenuhi kebutuhan air. Pernyataan ini diperkuat dengan data pada Rancangan Kontingensi NTT 52.658 jiwa Masyarakat Sumba Barat mengalami kekurangan air.

3.1.3. Recovery (pemulihan)

Pada dimensi pemulihan ini adalah pemfokusan terhadap tahap manajemen bencana yaitu Rehabilitasi dan Rekonstruksi dimana proses penanggulangan bencana ini dilakukan setelah terjadinya bencana. Peneliti menempatkan tahapan ini pada tahapan kedua karena setelah bencana kekeringan terjadi harus disegerakan melakukan rehabilitasi dan rekonstruksi agar pemulihan dari dampak bencana kekeringan agar bisa kembali seperti semula.

Recovery dari bencana kekeringan hanya dilakukan oleh satu Dinas saja yaitu Dinas PUPR dimana pihak PUPR memiliki program pembangunan Daerah Irigasi. Peneliti menemukan pembangunan daerah irigasi membantu masyarakat terdampak kekeringan khususnya pada bidang pertanian dimana dapat membantu pemulihan sawah dengan cepat setelah kekeringan terjadi. Walaupun masih ada kendala yang dijumpai tapi tidak mengurangi manfaat dari daerah irigasi.

3.2. Kendala dalam Penanggulangan Bencana Kekeringan

3.2.1. Kebijakan Yang Berstatus Siaga

Dilihat hingga saat ini penanggulangan bencana kekeringan di Sumba Barat belum menjadi prioritas yang mengakibatkan belum maksimal dalam pelaksanaannya. Hal ini juga mempengaruhi penyediaan anggaran dimana penganggaran hanya diperuntukan bagi kegiatan yang menjadi program prioritas saja.

Penyebab utama status bencana kekeringan di Sumba Barat masih berada pada status siaga dan belum menjadi status darurat bencana karena belum memenuhi indikator status bencana darurat yang telah ditetapkan BNPB. Yang dimaksud indikator bencana darurat sebagai berikut :

1. Gangguan kehidupan adalah kondisi yang mengakibatkan adanya korban bencana dan/atau pengungsian.
2. Gangguan penghidupan adalah suatu kondisi yang mengakibatkan adanya kerusakan prasarana dan sarana, kerusakan lingkungan, kerugian, dan dampak psikologis. (pedoman penetapan status keadaan darurat bencana, BNPB 2016)

Dari kutipan diatas dapat dilihat bahwa penetapan status darurat bencana harus memenuhi kedua indikator tersebut dan tidak diperkenankan hanya memiliki salah satu indikator. Peneliti menemukan keadaan di lapangan bahwa Kab. Sumba Barat hanya memiliki satu indikator yaitu gangguan penghidupan yang mengakibatkan kerusakan lingkungan dan kerugian saja.

Penyebab selanjutnya belum adanya pengajuan dari BPBD terkait status bencana kekeringan di Sumba Barat. Hal ini disebabkan karena belum adanya evaluasi kembali terhadap bahaya bencana kekeringan oleh BPBD,

ketidakadaannya pedoman penentuan standar korban, dan kurangnya ahli bencana kekeringan di BPBD.

3.2.2. Anggaran

Kendala yang selanjutnya yang ditemukan pada penelitian ini adalah masalah anggaran dalam proses penanggulangan bencana kekeringan. Selain status bencana kekeringan di Sumba Barat masih berstatus siaga maka penganggaran untuk penanganan bencana kekeringan belum menjadi prioritas utama pemerintah daerah. Sehingga program kegiatan penanggulangan bencana kekeringan hanya sebatas penanganan bencana siaga saja.

Tabel 3.1 Laporan Penggunaan Anggaran BPBD Tahun 2022

No	Kegiatan	Anggaran Awal (Rp.)	Realisasi (%)
1	Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana	99.999.700	98,89%
2	Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	468.088.100	86,71
3	Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	219.133.500	99,69
4	Kegiatan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	178.033.000	55,48

Sumber : LPPD BPBD, 2022

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa pemanfaatan anggaran BPBD tidak menyentuh angka 100% dan berdasarkan hasil temuan penulis berkaitan dengan program penanggulangan bencana kekeringan hanya terdapat pada pendistribusian air dimana anggaran dikurangi dengan tidak menambah kendaraan oprasional padahal dapat dilihat penyebaran daerah kekeringan sangat jauh dari satu titik ke titik lain.

3.2.3. Pendataan Korban

Kendala yang terakhir pada penelitian yang ditemui peneliti adalah dalam proses pendataan korban dimana dalam laporan status bencana kekeringan belum ditemukan padahal melihat dari data banyak yang terdampak kekeringan yang menyebabkan seharusnya banyak korban yang tercatat

3.3. Upaya Mengatasi kendala Penanggulangan Bencana Kekeringan

3.3.1. Upaya Yang Dapat Dilakukan Untuk Mengatasi Kebijakan Status Bencana Kekeringan Yang Berstatus Siaga

Upaya yang dilakukan dalam mengatasi kebijakan Status Bencana kekeringan adalah pengkajian ulang terhadap status tersebut dengan mengumpulkan data-data oleh BPBD selaku OPD penanggungjawab penanggulangan bencana.

3.3.2. Upaya Yang Dapat Dilakukan Untuk Mengatasi Kendala Anggaran

a. BPBD

Pada BPBD masalah anggaran yang dialami adalah kekurangan biaya dalam Penyediaan program penanggulangan bencana kekeringan sehingga hanya dapat dilakukan beberapa saja seperti pendistribusian air tangki. Upaya yang dilakukan BPBD adalah menyelipkan kegiatan sosialisasi bencana kekeringan pada kegiatan sosialisasi bencana kebakaran hutan dan lahan. Selanjutnya guna mengurangi kelebihan anggaran dalam distribusi air bersih BPBD mengakali dengan melakukan pendistribusian hanya menggunakan kendaraan milik BPBD tanpa menambah sewa kendaraan.

b. Dinas Sosial

Pada Dinas Sosial ditemui masalah anggaran berupa biaya transport dan tidak adanya anggaran belanja kusus bantuan bencana kekeringan. Upaya yang dilakukan adalah menggunakan kendaraan pribadi dalam mendistribusikan bantuan untuk menghindari biaya sewa kendaraan. Selanjutnya mengganti anggaran belanja barang bantuan pada paket bantuan bencana yang belum dibelanjakan dengan barang yang diperlukan untuk kebutuhan dalam bencana kekeringan.

c. Dinas PUPR

Pada dinas PUPR temukan kekurangan anggaran dalam pembangunan irigasi dan sumur bor. Upaya yang dilakukan adalah memanfaatkan dana hibah dari LSM terkait penyediaan SPAM dan irigasi di Kab. Sumba Barat.

3.3.3. Upaya Yang Dapat Dilakukan Untuk Mengatasi Kendala Pendaatan Korban

Kendala pendataan korban ditemukan di 2 OPD yaitu BPBD dan Dinas Sosial. Kendala yang ditemui berupa proses pendataan korban yang masih melewati laporan dengan sistematika yang rumit. Maka kedua OPD memiliki cara mengatasi yang sama yaitu dengan cara mengkoordinasikan lagi kepada kepala wilayah dan perangkat bantuan yang melekat pada masyarakat untuk membantu pendataan korban karena kepala wilayah dan perangkat bantuan memiliki kompetensi dalam melakukan laporan agar lebih cepat.

3.4. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Kekeringan didefinisikan sebagai kekurangan curah hujan pada waktu tertentu yang membuat penurunan jumlah air yang digunakan untuk kebutuhan (I wayan, dkk, 2023). Dapat disimpulkan bahwa kekeringan adalah bencana alam yang disebabkan oleh kekurangan air pada suatu daerah dan menimbulkan gangguan pada siklus kehidupan sehari-hari. Penanggulangan bencana kekeringan dengan berfokus pada peningkatan persediaan air, persiapan menghadapi bencana kekeringan dan pembangunan sarana-prasarana pemuliahan dari bencana kekeringan bagi masyarakat Sumba Barat seperti pada penelitian Peran Pemerintah Desa Hargomulyo Kecamatan Kokap Kabupaten Kulon Progo Dalam Penanggulangan Kekeringan oleh Rangga Riawan Haryo Praseno dan Gerry Katon Mahendra (2021). Bencana kekeringan masih disepelekan karena jumlah korban yang diakibatkan tidak terlalu terlihat. Padahal bencana kekeringan memiliki risiko dampak yang lebih berbahaya dan mampu menimbulkan korban bencana yang lebih banyak dari bencana lain.

Dengan hal tersebut maka bencana kekeringan tidak boleh diremehkan dan harus dilakukan penanggulangan bencana kekeringan dengan baik. Pelaksanaan penanggulangan bencana kekeringan harus berdasarkan tahapan manajemen bencana, dimana ada 3 tahap yaitu Pra-bencana, Tanggap darurat, dan Pasca-bencana (Eva dan Sutiyo, 2023:76). Maka pihak pemda Kabupaten Sumba Barat melakukan penanggulangan bencana kekeringan dengan menerapkan tahapan manajemen bencana. Untuk mengkaji proses penanggulangan bencana kekeringan penulis menggunakan teori Nick Carter (2008) dengan mengambil Mitigation, Response, dan Recovery berbeda dengan penelitian milik Farichatun Nisa (2014) yang menggunakan Development. Namun penelitian ini memiliki hasil penanggulangan bencana kekeringan sudah dijalankan tapi belum efektif menurunkan risiko bencana kekeringan.

IV. KESIMPULAN

1. Pemerintah daerah Kab. Sumba Barat dalam penanggulangan bencana kekeringan di Kab. Sumba Barat memiliki program, antara lain:

a. Mitigation (Tahapan Pra Bencana)

Pada Pemembangunan non structural terdapat di BPBD Menyelipkan sosialisasi bahaya bencana kekeringan pada sosialisasi bencana kebakaran hutan dan lahan, serta menyusun dokumen kebencanaan Rencana Kontingensi Bencana kekeringan dengan referensi dari Rencana Kontingensi Bencana Kekeringan Prov. NTT.

Pembangunan Struktural terdapat pada dinas PUPR melakukan pembangunan SPAM untuk menjaga ketersediaan air pada musim kemarau

b. Response (tanggap darurat)

BPBD melakukan pendistribusian air bersih pada daerah terdampak kekeringan. dan Dinas Sosial melakukan penyaluran bantuan bencana kepada korban

c. Recovery (tahapan pasca bencana)

BPBD Sumba Barat tidak memiliki program terkait bencana kekeringan akibat keterbatasan anggaran. Pada Dinas PUPR membangun D. I untuk mempercepat pemulihan khususnya daerah persawahan yang terdampak.

2. Kendala yang ditemukan pada penanggulangan bencana kekeringan sebagai berikut; Kebijakan pemerintah daerah yang masih menetapkan bencana kekeringan berstatus siaga padahal dampak kekeringan memiliki risiko tinggi untuk merugikan masyarakat Sumba Barat. Kedua masalah anggaran yang mengakibatkan banyak program tidak optimal. Ketiga adalah pendataan korban terdampak kekeringan dikarenakan pada penelitian ditemukan pendataan korban masih dilakukan secara manual dan menggunakan sistem pelaporan mengakibatkan data korban terdampak bencana kekeringan tidak terdata sama sekali.
3. Upaya dalam mengatasi kendala pada penanggulangan bencana kekeringan sebagai: Melakukan pengkajian kembali terkait status bencana kekeringan di Kab. Sumba Barat, Mengoptimalkan anggaran dalam menjalankan program penanggulangan bencana kekeringan, Koordinasi kepada pihak yang berkompeten terkait pendataan korban terdampak bencana kekeringan.

Keterbatasan Penelitian: Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian. Penelitian juga hanya dilakukan pada 3 OPD saja yang penulis menilai mewakili penanggulangan bencana kekeringan padahal berdasarkan SOP penanggulangan kurang lebih yang terlibat adalah melibatkan BMKG, TNI/Polri, BASARNAS, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Dinas PUPR, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Forum PRB dan lainnya.

Arah Masa Depan Penelitian (future work): Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan penanggulangan bencana kekeringan di Kabupaten Sumba Barat.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih diberikan kepada Kepala Badan Penanggulangan Bencana, Kepala Dinas Sosial, dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat beserta seluruh jajarannya atas bantuan dan dukungannya, serta kepada dosen pembimbing dan orang-orang yang telah membantu dalam penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Adi, Henny Pratiwi. 2011. *Kondisi Dan Konsep Penanggulangan Bencana Kekeringan Di Jawa Tengah*. Jurusan Teknik Sipil, Fakultas Teknik Universitas Islam Sultan Agung. 85(3), 978-602.
http://cyber.unissula.ac.id/journal/dosen/publikasi/210200030/9402artikel_kekeringan_2011.pdf
- Angina, Ignasius Suban. Dan Atapukang, Nurmasa. 2016. *Pendidikan Dan Pendampingan Masyarakat Tangguh Bencana Kekeringan Di Kecamatan Kualin Dan Amanuban Selatan Kabupaten Timor Tengah Selatan Provinsi Nusa Tenggara Timur*. Jurusan Pendidikan Geografi FKIP Universitas Nusa Cendana Kupang.
https://publikasiilmiah.ums.ac.id/bitstream/handle/11617/8544/46_Ignasius%20Suban%20Angin.pdf?sequence=1
- Arinci, Krismona Dewi. Nugroho, Asianto. 2020. *Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dalam Mengatasi Kekeringan Di Kabupaten Wonogiri*. Jurnal Discretie 1(3). <https://jurnal.uns.ac.id/discretie/article/view/50262>
- Aziz, Isna Rasdiana ddk. 2018. *Peran Etnobotani Sebagai Upaya Konservasi Keanekaragaman Hayati oleh Berbagai Suku di Indonesia*. Prosiding Seminar Nasional Biologi. 4(1).54-57. <https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/psb/article/view/9596>
- Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. 2023. *Anomali Suhu Udara Rata-Rata Tahun 2022*. <https://www.bmkg.go.id/iklim/?p=ekstrem-perubahan-iklim#:~:text=Berdasarkan%20data%20dari%2091%20stasiun,adalah%20sebesar%2027.0%20%C2%B0C>
- Bendi, Muhammad Indra. 2024. *Informasi Peringatan Dini Potensi Kekeringan Meteorologis Provinsi Nusa Tenggara Timur*. Jurnal Ilmu Komputer dan Sistem Informasi. 7(1).
<http://ejournal.sisfokomtek.org/index.php/jikom/article/view/2346>
- Charisma, Made Mira. Dkk. 2015. *Analisis Kekeringan Di Kabupaten Ende Provinsi Nusa Tenggara Timur*. Universitas Gadjah Mada.
https://etd.repository.ugm.ac.id/home/detail_pencarian/80767
- Carter, Nick. 2008. *Disaster Management : A Disaster Manager's Handbook*. Filiphina : Asian Development Bank.
<https://www.adb.org/sites/default/files/publication/27890/disaster-management-handbook>
- Nisa, Farichatun. 2014. *Manajemen Penanggulangan Bencana Banjir, Puting Beliung, Dan Tanah Longsor Di Kabupaten Jombang*. Universitas Airlangga Surabaya. 2(2). 103-220.
<https://jkmp.umsida.ac.id/index.php/jkmp/article/view/1605>

- Nursyabani. 2020. *Mitigasi Bencana Dalam Peningkatan Kewaspadaan Terhadap Ancaman Gempa*. [Diploma thesis] Universitas Andalas. <http://scholar.unand.ac.id/62201/>
- Praseno, Rangga Riawan Haryo. Mahendra, Gerry Katon. 2021. *Peran Pemerintah Desa Hargomulyo Kecamatan Kokap Kabupaten Kulon Progo Dalam Penanggulangan Kekeringan*. Caraka Prabu : Jurnal Ilmu Pemerintahan. 5(1). 114-126. <http://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/jurnal-caraka-prabu/article/view/417>
- Purnomo, Setyawan. Dkk. 2021. *Penilaian Bencana Kekeringan dan Strategi Penyediaan Air Bersih di Wilayah Utara Kabupaten Lumajang*. Jurnal Teknik Pengairan 12(2). 92-103. <https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/96896756/379-libre.pdf?1672997462=&response-content-disposition=inline%3B+filename%3DPenilaian+Bencana+Kekeringan+dan+Strateg.pdf&Expires=1718115125&Signature=XkeH8bylu3jRBsk4pTUV-vFJaWQKj3KUVm7afPWDkaThKPG8SS3PyFDwPL7wGsh00ZeD3OTbZeURCP Cm2XeFWVZ8K62y-oX8JfUIV-0COIVPaVow-uTkUuy00kzKz4V26CLtEo07CrxqGi~z6ShK-XUbSfWfNIcPTRewDBU9h5j4l796jLFpsJgxmIzA5HrLRUOOOZQqnyrhens0zH1jINaR4UCxci37zSbqW7EGqpDgixF5T0o~u93q6jziDUZH1LdKKwhUXIdyZCVUHz1p2kCJoqYZLDAJ8hGOYLg4syTj2Gib-MHlkopRLBb5IOOsm7H5F11u6guEwEwfdOKwgAw &Key-Pair-Id=APKAJLOHF5GGSLRBV4ZA>
- Putratama, Rozar. 2023. *63% Wilayah Sudah Masuk Musim Kemarau, Indonesia Bersiap Hadapi El Nino*. <https://www.bmkg.go.id/Berita/?p=63-wilayah-sudah-masuk-musim-kemarau-indonesia-bersiap-hadapi-el-nino&tag=&lang=ID>
- Royana, Isna. 2020. *Perancangan Teknologi Energi Surya Untuk Mengatasi Kekeringan Di Daerah Perbatasan*. Jurnal Dialog Penanggulangan Bencana. 11(2). <https://jdpb.bnpb.go.id/index.php/jurnal/article/view/169>
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung : ALFABETA.CV. <https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=1543971>
- Wayan, I dkk. 2023. *Sebaran Kekeringan Hidrologi Berdasarkan Debit Air Aliran di Kabupaten Bima*. Jurnal Fanec Swara. 17(1). 72-80. <https://www.journal.unmasmataram.ac.id/index.php/GARA/article/view/371>
- Wekke, Ismail Suardi. 2019. *Metode Penelitian Sosial*. Yogyakarta : Gawe Buku. https://www.researchgate.net/publication/344211045_Metode_Penelitian_Sosial